BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi adalah sebuah proses multidimensi yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan kelembagaan nasional, seperti halnya percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan, dan pemberantasan kemiskinan mutlak (Novriansyah, 2018). Tujuan dilaksanakanya pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat. Salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan adalah berkurangnya jumlah penduduk miskin. Diperlukan berbagai upaya dan kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan kemiskinan.

Provinsi Jawa Tengah termasuk provinsi yang memiliki jumlah penduduk miskin cukup tinggi. Faulana & Murniawaty (2021) menyatakan tingginya jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah membutuhkan sebuah kebijakan bersama dalam mengelola wilayah pemerintah provinsi dan pusat dengan berfokus pada kabupaten atau kota yang banyak memiliki jumlah penduduk miskin, sehingga permasalahan tersebut dapat segera diatasi. Angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa. Data kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah 2011-2020 ditampilkan pada Tabel 1-1.

Tabel 1- 1
Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2020

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	
	(Ribu Jiwa)	%
2011	5256	16,21
2012	4863	14,98
2013	4811	14,44
2014	4561	13,58
2015	4577	13,58
2016	4506	13,27
2017	4450	13,01
2018	3897	11,32
2019	3743	10,80
2020	3980	11,41

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (diolah)

Tabel 1-1 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan menurun kecuali pada tahun 2015 dan 2020. Kenaikan tingkat kemiskinan pada tahun 2015 disebabkan karena kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Sementara itu, kenaikan jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 disebabkan oleh adanya pandemi *Covid-19* yang melanda Indonesia yang memperlambat aktivitas ekonomi. Hal tersebut membuat perubahan aktivitas ekonomi di Provinsi Jawa Tengah belum banyak berperan dalam menurunkan kemiskinan.

Salah satu faktor yang memengaruhi kemiskinan adalah modal manusia yang terdiri dari pendidikan dan kesehatan. Sjafii (2001) menyatakan bahwa modal manusia merupakan salah satu determinan penting dalam proses

pertumbuhan ekonomi. Penduduk dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk menjadi miskin. Kesehatan perlu diperhatikan juga karena kesehatan individu menentukan produktivitas sehingga semakin rendah tingkat kesehatan, semakin besar kemungkinan individu untuk terjebak dalam kemiskinan. Kualitas pendidikan dan kesehatan yang meningkat akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka, dapat dikatakan bahwa perbaikan modal manusia dapat mengurangi jumlah penduduk miskin.

Tabel 1- 2
Usia Harapan Hidup (UHH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2020

Tahun	UHH	RLS
	(Tahun)	
2011	72,91	6,74
2012	73,09	6,77
2013	73,28	6,80
2014	73,88	6,93
2015	73,96	7,03
2016	74,02	7,15
2017	74,08	7,27
2018	74,18	7,35
2019	74,23	7,53
2020	74,37	7,69

Sumber: BPS (diolah)

Berdasarkan Tabel 1-2, nampak bahwa rata-rata lama sekolah di Provinsi Jawa Tengah meningkat dari tahun 2011-2020. Meski demikian, lama sekolah di Provinsi Jawa Tengah masih setara lulusan SD, yang menunjukkan rendahnya jenjang pendidikan yang ditamatkan. Dikhawatirkan penduduk Provinsi Jawa Tengah akan kesulitan memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang layak. Sementara itu, UHH di Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan. Sarana

kesehatan di Provinsi Jawa Tengah yang dapat diakses oleh warga tergolong memadai dan sangat berpotensi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Provinsi Jawa Tengah menduduki posisi ketiga jumlah penduduk terbanyak di Pulau Jawa setelah Jawa Barat dan Jawa Timur. Banyaknya penduduk menyebabkan potensi angkatan kerja ikut meningkat sehingga pemerintah dituntut untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih besar. Permasalahannya bukan hanya menyangkut bagaimana ketersediaan lapangan kerja bagi angkatan kerja, akan tetapi apakah lapangan kerja yang ada cukup mampu memberi imbal jasa yang layak bagi pekerja (Effendi, 2014). Kesejahteraan masyarakat akan tercapai jika pekerja memperoleh upah yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga masyarakat tidak miskin.

Tabel 1- 3
Jumlah Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2020

Tahun	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Total Angkatan Kerja
		(Jiwa)	
2011	15.822.765	1.203.342	17.026.107
2012	16.531.395	982.093	17.513.488
2013	16.469.960	1.054.062	17.524.022
2014	16.550.682	996.344	17.547.026
2015	16.435.142	863.783	17.298.925
2017	17.186.674	823.938	18.010.612
2018	17.413.869	815.083	18.228.952
2019	17.602.917	818.276	18.421.193
2020	17.536.935	1.214.342	18.751.277

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (diolah)

Berdasarkan Tabel 1-3, nampak bahwa angkatan kerja dan jumlah penduduk bekerja di Provinsi Jawa Tengah cenderung meningkat. Peningkatan

jumlah penduduk bekerja di Provinsi Jawa Tengah menandakan kesadaran masyarakat agar dapat terus bertahan hidup. Masyarakat yang memiliki pekerjaan akan memiliki penghasilan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup, sehingga terlepas dari kemiskinan.

Faktor selanjutnya yang memengaruhi kemiskinan adalah upah. Upah minimum di Indonesia didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan pertimbangan untuk melindungi kesejahteraan pekerja. Upah yang rendah akan membuat masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhannya, sehingga mereka akan semakin dekat dengan Garis Kemiskinan (Ningrum, 2017). Dengan demikian, upah minimum dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengurangi kemiskinan.

Grafik 1- 1
Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2020

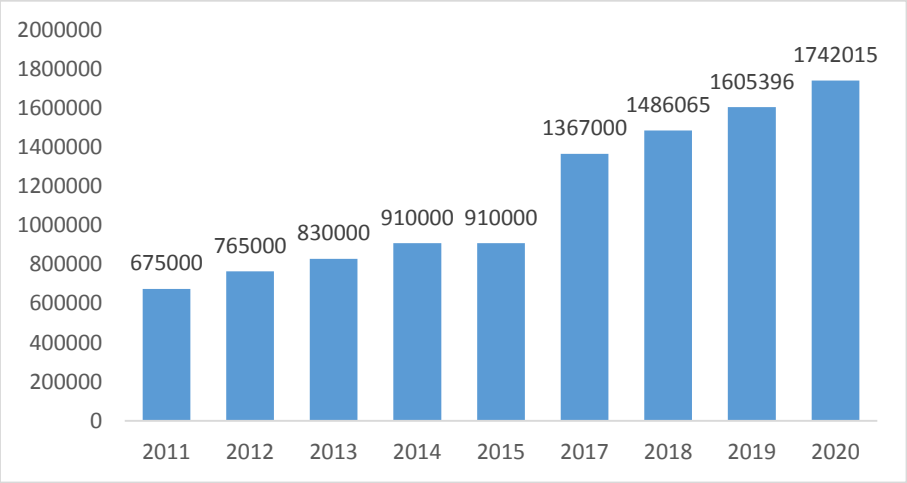

Sumber: BPS Indonesia (diolah)

Grafik 1-1 menunjukkan bahwa Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan pada tahun 2011-2020. Pemerintah mengambil kebijakan

untuk meningkatkan upah untuk memicu minat masyarakat dalam bekerja. Meningkatnya upah akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, diharapkan produktivitas dan kesejahteraan para pekerja meningkat.

B. Rumusan Masalah

Tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2011 hingga tahun 2020 mengalami penurunan dari 5.256 ribu jiwa di tahun 2011 menjadi 3.980 ribu jiwa di tahun 2020. Meski demikian, masih banyak penduduk miskin dan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah masih tergolong tinggi di Pulau Jawa. Penyebabnya adalah belum meratanya hasil dari usaha pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan keseluruh kabupaten/kota.

Salah satu faktor yang memengaruhi kemiskinan adalah pendidikan dan kesehatan. Tingkat pendidikan dan kesehatan di Provinsi Jawa Tengah menurun di tahun 2020 akibat pandemi *Covid-19*. Selain itu, selama kurun waktu 2011-2020, upah minimum Provinsi Jawa Tengah meningkat. Upah minimum yang meningkat menyebabkan minat seseorang untuk bekerja meningkat juga, dan hal tersebut dapat mengurangi kemiskinan. Lalu, jumlah orang bekerja yang menurun di tahun 2020 dikhawatirkan akan berakibat buruk pada kesejahteraan masyarakat, karena masyarakat tidak memperoleh pendapatan, yang dapat berujung pada kemiskinan.

Atas dasar permasalahan di atas, diketahui bahwa di Provinsi Jawa Tengah masih banyak jumlah penduduk miskin yang diduga disebabkan oleh beberapa

faktor. Maka, perlu dilakukan penelitian mengenai pengaruh Rata-rata Lama Sekolah, Usia Harapan Hidup, jumlah penduduk bekerja, dan upah minimum terhadap persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2020.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengestimasi pengaruh Rata-rata Lama Sekolah, Usia Harapan Hidup, jumlah penduduk bekerja, dan upah minimum terhadap persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2020.

D. Manfaat Penelitian

Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk penyusunan kebijakan dalam mengentaskan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi penelitian tentang pengentasan kemiskinan.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan landasan teori tentang kemiskinan dan pengaruh masing-masing variabel independen yaitu Rata-rata

Lama Sekolah, Usia Harapan Hidup, jumlah penduduk bekerja, dan upah minimum terhadap persentase penduduk miskin. Kemudian, bab ini juga akan menjabarkan beberapa penelitian terdahulu dan merumuskan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang alat dan model analisis beserta langkah-langkah estimasi dan hasil dari uji hipotesisnya, serta jenis dan sumber data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil analisis data, interpretasi hasil regresi, dan interpretasi ekonomi.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir yang berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian, serta keterbatasan penelitian.